

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Sistem Hubungan Kekeabatan
 - a. Pengertian Sistem Kekeabatan

Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang dibentuk dari hubungan-hubungan atau relasi organisasi. Sistem sosial merupakan hubungan fungsional dari unsur-unsur suatu sistem dalam bentuk gejala sosial di masyarakat.¹ Sedangkan unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan disebut kekeabatan. Anggota kekeabatan terdiri atas beberapa struktur yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu, menantu, sepupu, kakak, adik, paman, bibi, dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi terdapat beberapa macam kelompok kekeabatan dari aspek yang jumlahnya relatif kecil hingga besar, seperti dalam lingkup keluarga inti ataupun keluarga besar.²

Adanya kekeabatan dapat menciptakan suatu hubungan sosial. Dalam setiap hubungan memiliki pengertian bahwa ikatan pada setiap individu itu memahami tentang kehadirannya disamping individu lain. Hubungan yang terjalin kemudian akan membentuk suatu interaksi sosial. Interaksi sosial ialah suatu hubungan antara individu atau lebih, dimana perilaku dari individu satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Adapun ciri-ciri adanya interaksi sosial dalam masyarakat yaitu: 1) Terdapat dua orang pemain atau lebih; 2) Adanya hubungan timbal balik atau terjadi

¹ Thohir Yuli Kusmanto & Misbah Zulfa Elizabeth, "Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis", *Jurnal Sosiologi Walisongo* 2, no. 1 (2018): 41.

² Isabella, "Pengaruh Sistem Kekeabatan terhadap Sikap Nasionalisme Masyarakat Batak Toba di Bandar Lampung", *Skripsi*, Universitas Lampung, Tahun 2014, 09.

komunikasi antar-pemain; 3) Diawali dengan kontak sosial, baik respon secara langsung; 4) Memiliki maksud dan tujuan yang jelas.³

Sedangkan sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi lebih dari itu terdapat hubungan darah yang mengikat satu sama lain. Selain itu juga kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau *linege* dan garis keturunan atau *descent*. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai leluhur yang sama. Sistem kekerabatan ialah hubungan berdasarkan pada model ikatan yang dilihat dari seorang bapak dengan anak, atau seorang ibu dengan anak.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian dari sistem hubungan sosial serta sistem kekerabatan, dapat disimpulkan bahwa sistem hubungan kekerabatan adalah bagian penting dari adanya struktur sosial di masyarakat, yang merupakan konsep hubungan kompleks berdasarkan garis perkawinan dan hubungan darah. Dinyatakan hubungan darah karena seseorang sebagai kerabat memiliki kontak hubungan berdasarkan ikatan darah dengan seseorang lainnya, sehingga memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya. Sedangkan garis perkawinan terjadi karena adanya komitmen antara kedua individu yang menyebabkan terjalinnya suatu hubungan keluarga, sehingga satu sama lain memiliki ikatan.

b. Prinsip Hubungan Kekerabatan

Batas dari hubungan kekerabatan ditentukan oleh prinsip keturunan atau *principle of descent*, prinsip-prinsip itu mempunyai suatu akibat yang bersifat selektif karena menentukan siapakah diantara kelompok kerabat biologis yang termasuk dalam hubungan dekat dengan kerabat dan luar batasan

³ Nella Malentika, dkk, "Hubungan antara Interaksi Sosial dengan Suasana Hati pada Mahasiswa", *Jurnal Ilmiah PSYCHE* 11, no. 2 (2017): 99.

⁴Isabella, "Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap Sikap Nasionalisme Masyarakat Batak Toba di Bandar Lampung", *Skripsi*, 09.

hubungan kerabat. Dengan demikian prinsip keturunan juga dapat berfungsi sebagai prinsip untuk menentukan keanggotaan dalam kelompok kekerabatan, terutama dalam kekerabatan yang bersifat lineal atau keturunan langsung.⁵ Adapun sistem kekerabatan berdasarkan keturunan memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip patrilineal atau *patrilineal descent*, merupakan sistem kekerabatan yang menetapkan garis keturunan berdasarkan satu garis kebawah dari ayah atau laki-laki. Hal tersebut mengakibatkan bahwa setiap individu dalam masyarakat dari garis keturunan laki-laki masuk batas hubungan kerabat, sedangkan dari perempuan tidak masuk dalam batas tersebut.⁶
- 2) Prinsip matrilineal atau *matrilineal descent*, sebaliknya menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan perempuan atau ibu. Hal tersebut mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat dari garis keturunan ibu merupakan hubungan kerabat, selain itu tidak termasuk atau diluar batas hubungan kerabat.⁷

Terdapat ciri-ciri khusus antara sistem kekerabatan matrilineal atau patrilineal. Ciri khusus sistem matrilineal adalah: 1) garis keturunan diurutkan melalui garis perempuan; 2) anggota kelompok keturunan diambil melalui garis perempuan; 3) penyerahan warisan atau harta peninggalan diberikan melalui garis perempuan. Sedangkan ciri khusus sistem patrilineal adalah semua hal apapun diberikan berdasarkan garis keturunan laki-laki, atau sebaliknya dari sistem matrilineal.⁸

⁵ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakjat, 1985), 124.

⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, 125.

⁷ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, 125.

⁸ Amri, marzali, "Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan di Kota Metropolitan", *Jurnal Antropologi Indonesia* 24, no. 01 (2000): 03.

c. Konsep Hubungan Kekerabatan

Kehidupan sosial masyarakat sejatinya selalu terjadi interaksi yang muncul sehingga dapat membangun relasi atau hubungan. Relasi tersebut dapat berbentuk relasi bidang ekonomi, relasi bidang politik, dan relasi bidang sosial budaya. Jika dibedakan dari perspektif wilayah tempat tinggal, maka kehidupan sosial dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu: kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya tinggal dalam satu kelompok kekerabatan yaitu berdasarkan ikatan keluarga. Dalam kehidupan pedesaan pada umumnya, anak-anak setelah menikah akan membuat rumah untuk tempat tinggal di lahan milik keluarga atau orang tua salah satu anak yang tentu berdekatan dalam satu kompleks. Akibat ikatan tersebut, timbul interaksi sosial yang berlangsung secara intensif dan mendalam sehingga memunculkan perasaan sentimen atau kasih sayang. Dalam hal ini terdapat unsur-unsur yaitu: senasib, sehati atau seperasaan, sepenanggungan, dan saling membutuhkan.⁹

Kekerabatan yang terjalin merupakan bagian dari satu keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem yang diharapkan dapat menjalin hubungan dua arah antara orang tua dengan anak. Adanya timbal balik dan kerjasama antara keduanya dapat mempererat ikatan keluarga serta keharmonisan dalam keluarga tersebut. Interaksi dua arah dalam sebuah keluarga disebut dengan *Mutual Synchrony*, artinya perilaku setiap orang bergantung pada perilaku sebelumnya dari mitranya. Posisi mitra yang dimaksud adalah orang tua, yakni pihak kedua yang selalu berada di samping anak dan menjadi teman berkomunikasi, berinteraksi, serta

⁹ Dewi Anggariani, "Politik Kekerabatan", *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 2 (2013): 02.

sosialisasi.¹⁰ Dalam hubungan keluarga berpengaruh atau tidaknya interaksi antara orang tua dengan anak bergantung pada bagaimana sikap dan komunikasi yang dibangun oleh keduanya. Salah satu ciri khas dan karakter dari manusia ialah saling berkomunikasi antara individu satu dengan lainnya. Komunikasi yang dimaksud yaitu bagaimana hubungan timbal balik atau saling terbuka yang terjalin antara orang tua dengan anak dalam keluarga dalam menyampaikan sesuatu.¹¹

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, tanggapan awal yang diterima dan diyakini kebenarannya dalam keluarga akan membentuk cara pandang individu terhadap dirinya dan lingkungan sekitar, yang kemudian kelak akan menentukan perilaku serta karakter anak sampai dewasa di lingkungan sosialnya. Sebagai orang tua perlu untuk melakukan proses penanaman nilai (*values*) kepada anak, agar kehidupan anak nantinya dapat tertata sesuai koridor yang ditentukan. Penanaman nilai-nilai moral juga sangat penting untuk perkembangan sehingga dapat menjadi regenerasi keluarga yang berkualitas secara pendidikan maupun moral.

2. Profesionalisme Pendidik

a. Pengertian Profesionalisme

Kata profesionalisme berasal dari Bahasa Inggris yaitu *profession*, memiliki makna serupa dengan kata *occupation* yaitu pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang didapatkan dari bangku pendidikan atau latihan khusus. Bentuk sederhana pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan atau aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh orang secara khusus disiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang karena tidak dapat atau tidak

¹⁰ Wardatul Asfiah & Lailul Ilham, “Urgensi Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hadits dan Psikologi Perkembangan”, *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam HISBAH* 16, no. 1 (2019): 4.

¹¹ Asmidir, Ilyas, “Peranan Keluarga sebagai Lingkungan Pendidikan di Tengah Derasnya Arus Perubahan Sosial”, *Jurnal Ta’dib: Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2005): 92.

memperoleh pekerjaan lainnya. Dengan demikian pekerjaan yang bersifat profesional ialah suatu bidang keahlian khusus untuk menangani suatu pekerjaan tertentu. Profesionalisme juga dapat berarti bahwa sebuah keahlian tertentu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan tinggi atau melalui latihan khusus. Pekerjaan profesional merupakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan hati nurani serta kewajiban dan didukung oleh ilmu pengetahuan yang sesuai atau yang mendukung pekerjaan tersebut.¹²

Adapun beberapa ciri pokok pekerjaan yang bersifat profesional, ciri yang pertama yaitu terdapat pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan khusus yang dilakukan secara formal, ciri kedua yaitu pekerjaan tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau lingkungan sekitar, ciri ketiga yaitu adanya organisasi profesi yang menaungi secara resmi dibawah kepengurusan lembaga profesional seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) dan lainnya. Terakhir ciri keempat yaitu memiliki kode etik dalam melaksanakan kewajiban, sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi pekerjaan yang dijalankan tersebut.¹³ Dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik profesional adalah mereka yang memiliki ilmu, keahlian atau keterampilan serta kemampuan yang memenuhi standar kualitas tertentu juga melalui pendidikan profesi atau latihan khusus.

Profesi tenaga pendidik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: "Profesi guru dan

¹² Indah Susilowati, dkk, "Strategi Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendekatan *Analysis Hierarchy Process*", *JEJAK Journal Of Economics and Policy* 6, no. 1 (2013): 83.

¹³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), 45.

dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: 1) Memiliki bakat dan kemampuan, kesenangan dan minat, panggilan jiwa serta idealis atau cerdas; 2) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidangnya; 3) Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugasnya; 4) Menjalankan dan mematuhi kode etik profesi guru; 5) Memiliki hak dan kewajiban dalam menyelesaikan tanggung jawab; 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; 7) Memiliki kesempatan untuk meningkatkan profesinya secara berkelanjutan; 8) Memperoleh perlindungan hukum serta jaminan dalam melaksanakan tugas profesionalnya; 9) Memiliki naungan organisasi profesi yang berbadan hukum". Selanjutnya dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 disebutkan bahwa "pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki tekad dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".¹⁴

b. Indikator Pendidik Profesional

Pendidik profesional memiliki dua tugas yang mencerminkan perilaku atau refleksi profesional dalam tugas yaitu memiliki komitmen tinggi terhadap siswa (*Commitment to the student*) dan mempunyai komitmen tinggi terhadap profesi itu sendiri (*commitment to the profession*).¹⁵

Komitmen pada dasarnya adalah kesediaan seseorang untuk selalu mengikat diri dan mempertahankan atau mengeluarkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk selalu fokus terhadap tugas-tugas organisasi (sekolah), dan sikap positif yang sangat kuat

¹⁴ Mustofa, "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 4, no. 1 (2007): 78.

¹⁵ Ahmad Suriansyah, dkk, *Profesi Kependidikan "Perspektif Guru Profesional"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015), 35.

dan terus-menerus terjaga dari seseorang dan segala hal terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.¹⁶ Seorang pendidik yang memiliki komitmen tinggi terhadap siswa dapat diamati dari perilaku-perilaku yang muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu:

- 1) Membantu dan mendorong peserta didik untuk merealisasikan potensinya dalam mencapai tujuan belajar, sehingga peserta didik dapat mewujudkan semua potensi yang ada pada dirinya.
- 2) Mendorong semangat para peserta didik untuk mau dan mampu melaksanakan penelitian, guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri atau berkelompok.
- 3) Mengajar peserta didiknya dengan tujuan yang tepat serta mempunyai harapan yang tinggi terhadap peserta didiknya.
- 4) Perhatian dan kasih sayang terhadap peserta didiknya yang ditunjukkan dalam bentuk selalu berkomunikasi secara harmonis dengan peserta didiknya melalui pendampingan kemajuan prestasi belajar.
- 5) Melibatkan peserta didik dalam belajar. Artinya selalu berusaha agar peserta didik dapat aktif dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung.¹⁷

Selanjutnya yaitu komitmen terhadap profesi yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada peserta didiknya. Berikut indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana kualitas dan kuantitas layanan pendidik (mempunyai komitmen dalam profesi):

¹⁶ Ahmad Suriansyah, dkk, *Profesi Kependidikan "Perspektif Guru Profesional"*, 36.

¹⁷ Ahmad Suriansyah, dkk, *Profesi Kependidikan "Perspektif Guru Profesional"*, 36.

- 1) Sedikit waktu yang terbuang dalam memulai dan mengakhiri kegiatan pelajaran. Artinya bahwa pendidik menggunakan waktu yang tersedia dalam kegiatan belajar mengajar hanya untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Misalnya dengan datang tepat waktu atau disiplin dalam menjalankan tugas apapun terutama mengajar.
- 2) Ketepatan menyeleksi dan memilih materi dan metode yang cocok atau tepat dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan, materi, pendidik dan lainnya. Dalam hal ini pendidik menentukan metode yang baik dan variatif untuk mencapai keberhasilan belajar peserta didiknya.
- 3) Selalu berusaha untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan peningkatan kompetensi dan profesinya secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pendidik yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesi mempunyai kebiasaan untuk terus belajar supaya menambah wawasan dan pengetahuannya.
- 4) Melakukan evaluasi belajar secara tepat dalam arti teknik dan prosedur yang dilakukan.
- 5) Senantiasa berusaha dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi peserta didiknya dalam belajar serta masalah apapun yang dihadapi selama proses pengajaran dengan berupaya untuk mencari alternatif solusinya. Dan selalu terbuka (*open minded*) untuk menerima pendapat dan masukan orang lain dalam usaha memajukan kegiatan belajar mengajar.¹⁸

¹⁸ Ahmad Suriansyah, dkk, *Profesi Kependidikan "Perspektif Guru Profesional"*, 37.

c. Kompetensi Pendidik

Kompetensi merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan serta kemampuan yang menghasilkan keterampilan dan nilai-nilai dasar yang digambarkan melalui kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pendidik dapat menunjukkan kualitas maupun kompetensi pendidik sebenarnya. Standar kompetensi pendidik adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk kecakapan dalam pengetahuan dan perilaku atau perbuatan bagi seorang pendidik agar berkualitas dan layak untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi serta jenjang pendidikan.¹⁹

Keberadaan pendidik menjadi bagian penting terhadap keberhasilan sekolah, utamanya bagi pendidik yang melaksanakan fungsi mengajarnya dengan penuh makna (*purposeful teaching*). Maksudnya pendidik sangat berkompeten di bidangnya, dapat ditunjukkan melalui hasil pekerjaan yang profesional dan menjadi seorang yang serba bisa (*multitalent*), juga memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi dan peserta didiknya (*high expectation all round*). Pendidik yang cerdas harus senantiasa bergulat dengan ilmu pengetahuan serta mencintai tantangan dalam bidang intelektual, pendidik juga harus menjadi seorang komunikator yang mampu menanamkan harapan kepada siswanya (*communicating expectation*). Pemerintah telah memutuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Subtansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Pasal 28 Ayat (3) menjelaskan bahwa “kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai agen pembelajaran adalah Kompetensi

¹⁹ Indah Susilowati dkk, “Strategi Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendekatan *Analysis Hierarchy Process*”, 84.

Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional”.²⁰ Berikut akan dijelaskan mengenai kompetensi-kompetensi tersebut:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penyampaian serta pemahaman terhadap peserta didik, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Berikut ini penjelasan tentang komponen kompetensi pedagogik:

- a) Memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, fisik, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- b) Menguasai teori-teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik bagi peserta.
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diambil serta menyelenggarakan pendidikan yang mendidik dan bermanfaat bagi peserta.
- d) Meningkatkan kemampuan peserta didik melalui pelatihan untuk mengekspresikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- e) Membuka komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik secara berkelanjutan.
- f) Melakukan penilaian atau evaluasi proses dan hasil belajar, kemudian menggunakan hasil penilaian untuk kepentingan perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya.
- g) Memberikan tindakan reflektif atau gerakan badan dalam proses penyampaian materi untuk

²⁰ Rusdiana dkk, *Pendidikan Profesi Keguruan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 82-84.

memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.²¹

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan karakter yang dimiliki seperti perangai baik, seimbang, dewasa, cerdas dan bijaksana serta dapat menjadi contoh bagi peserta didik dengan mengutamakan kepribadian luhur. Adapun penjelasan tentang standar kompetensi kepribadian pendidik adalah sebagai berikut:

- a) Berperilaku menurut norma agama, hukum, sosial yang berlaku, dan sesuai dengan kebudayaan nasional Indonesia.
- b) Mempresentasikan diri sesuai dengan kepribadian, seperti jujur, berperangai baik, dan dapat menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c) Membawakan diri dengan karakter yang baik, seimbang, dewasa, arif dan bijaksana.
- d) Menjunjung tinggi etos kerja, rasa tanggung jawab dan profesional, percaya diri, dan kesenangan menjadi pendidik.
- e) Menerapkan dan melaksanakan kode etik profesi pendidik.²²

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari syarat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali murid, dan masyarakat. Kompetensi sosial tersebut diantaranya yaitu:

- a) Bersikap inklusif, bertindak adil dan tidak bersikap diskriminatif dengan memandang berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi

²¹ Rusdiana dkk, *Pendidikan Profesi Keguruan*, 85.

²² Rusdiana dkk, *Pendidikan Profesi Keguruan*, 86.

fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

- b) Berkomunikasi dengan efektif, empatik, dan santun terhadap sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua serta lingkungan masyarakat.
 - c) Beradaptasi dengan lingkungan tugas di seluruh kawasan republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya, dengan mengamalkan nilai yang tertulis dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.
 - d) Membuka komunikasi melalui lisan dan tulisan atau dalam bentuk lain dengan kelompok profesi sendiri maupun profesi lain.²³
- 4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kecakapan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang dapat membentuk peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kompetensi pokok dalam kompetensi profesional pendidik antara lain sebagai berikut:

- a) Memahami substansi materi pembelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir objektif yang mendukung mata pelajaran yang diberikan atau diambil.
- b) Menguasai kompetensi umum dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c) Menguraikan substansi dan bahan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik secara terstruktur, kreatif dan inovatif.
- d) Meningkatkan keprofesionalan dan tanggung jawab dengan berkelanjutan, dapat melalui tindakan reflektif.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan

²³ Rusdiana dkk, *Pendidikan Profesi Keguruan*, 86.

profesionalitas untuk menunjang pembelajaran yang maksimal²⁴

d. Peran, Fungsi, dan Tugas Pendidik

Peran seorang pendidik dalam proses pembelajaran yaitu sebagai perantara dan penengah. Peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan serta perubahan dalam tingkah laku maupun sikap, harus berupaya sendiri untuk mendapatkan suatu pengertian atau *insight*. Memahami bahwa: 1) pendidik merupakan seorang pembimbing yang mengantarkan peserta didik menuju kebaikan dan kedewasaan, pendidik bukanlah sang maha kuasa yang mampu membentuk anak menurut sekehendaknya dan keinginannya; 2) pendidik sebagai motivator untuk peserta didik yang akan hidup dan bekerja, serta dapat bermanfaat dalam masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian peserta didik harus dilatih dan dibiasakan di bawah pengawasan maksimal oleh pendidik di sekolah. 3) Pendidik sebagai pengukuh kedisiplinan, memberikan contoh serta menjadi panutan berbagai hal, tata tertib yang berlaku di sekolah maupun yang terdapat di lingkungan masyarakat sekolah; 4) pendidik sebagai administrator dan organisator dalam membimbing peserta didik menuju kesuksesan.²⁵

Fungsi pendidik sangatlah penting dalam proses pendidikan, pendidik merupakan faktor kunci dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi utama pendidik ialah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan masa lampau yang dianggap berguna dan bermanfaat sehingga harus di lestariakan kedepannya. Maka dari itu pendidik harus memiliki sikap profesional, seorang pendidik yang profesional akan menunjukkan sikap sadar tujuan dan sikap objektif.²⁶

Adapun tugas pendidik dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut:

²⁴ Rusdiana dkk, *Pendidikan Profesi Keguruan*, 87.

²⁵ Hamid Darmadi, "Tugas, Peran, Kompetensi Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional", *Jurnal Edukasi*, Vol. 13, No. 2 (2016): 165.

²⁶ Tedi priatno, *Etika Pendidikan Panduan untuk Guru Profesional*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), 205.

- 1) Tugas pendidik sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik yaitu melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih yaitu mengembangkan minat, keterampilan maupun bakat pada peserta didik.
 - 2) Tugas dalam bidang kemanusiaan, pendidik di sekolah harus dapat memosisikan dirinya sebagai orang tua kedua. Mereka harus mampu menarik perhatian sehingga dapat menjadi panutan para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, sepatutnya dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya untuk semangat dan rajin belajar.
 - 3) Tugas pendidik dalam bidang kemasyarakatan yaitu mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan bangsa yang berkontribusi dalam memberikan pendidikan serta bimbingan kepada masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang berbudi pekerti dan bermoral sesuai nilai Pancasila.²⁷
3. Lembaga Pendidikan
- a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar yang ditempuh oleh manusia dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan yang selanjutnya dapat menjadi dasar untuk bersikap dan berperilaku. Oleh sebab itu, pendidikan adalah salah satu proses pembentukan karakter manusia. Hal ini bermakna bahwa proses pendidikan dapat mewujudkan sikap dan perilaku yang akhirnya menjadi watak, kepribadian, atau karakter dalam membentuk manusia seutuhnya. Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pendidikan mengalami proses dinamis dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.²⁸

²⁷ Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 6-7.

²⁸ Titik Haryati & Nor Khoiriyah, "Analisis Muatan Nilai Karakter Dalam Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII", *Jurnal Pendidikan Karakter* 7, no. 1 (2017): 3.

Pendidikan merupakan aset jangka panjang bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Adanya pendidikan dapat mengubah manusia dari kebodohan menjadi kecerdasan, kegelapan menjadi terang, dan kemiskinan menjadi kemakmuran. Pendidikan dapat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari keberhasilan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut tentu sangat penting untuk diberikan kepada anak bangsa agar tercapai cita-cita bersama yaitu menuju Indonesia maju dan lebih baik.

b. Macam-macam Lembaga Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan tentu tidak dibatasi oleh lembaga formal atau resmi saja, namun terdapat pula lembaga non-formal maupun informal yang ikut berkontribusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang sesuai. Lembaga pendidikan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Lembaga Pendidikan Keluarga

Lingkungan Keluarga adalah tempat pertama dan utama anak dalam memperoleh pendidikan dan bimbingan karena sebagian besar dari kehidupan anak berada dalam keluarga.²⁹ Adanya tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu kunci suksesnya pendidikan. Peran keluarga sangat penting dalam proses pembentukan karakter anak dari awal. Sedangkan pendidikan lanjutan didapatkan dari pendidikan formal atau sekolah. Para sosiolog meyakini bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, sehingga mereka menyatakan bahwa keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga adalah tempat paling awal untuk menjalankan fungsi departemen pendidikan, kesehatan dan

²⁹ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 96-97.

kesejahteraan jangka panjang. Apabila dalam suatu keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, kebaikan, keinginan untuk menjadi yang terbaik serta memahami kemampuan dasar, maka akan sulit bagi lembaga lain untuk memperbaiki kegagalannya. Dampak kegagalan keluarga dalam pembentukan karakter anak dapat berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang memiliki karakter buruk atau bahkan tidak mempunyai karakter. Oleh sebab itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter anak bangsa sangat bergantung pada pendidikan karakter anak di rumah, sebab pendidikan utama yang dijadikan contoh adalah pendidikan dari keluarga.³⁰

2) Lembaga Pendidikan Sekolah

Pendidikan lanjutan setelah keluarga adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, menjadi pencetak individu yang memiliki kemampuan secara intelektual. Oleh karena itu, sekolah perlu merancang program dengan baik dan terstruktur. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik antara lain: a) Diselenggarakan secara khusus dengan membagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan berkelanjutan. b) Batas usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif sama atau sudah ada ketentuan untuk masuk ke setiap jenjang. c) Waktu untuk menempuh pendidikan memiliki rentang yang berbeda-beda sesuai dengan program pendidikan yang dipilih dan tentunya harus diselesaikan. d) Materi atau isi dalam proses pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum, namun adapula yang mengkolaborasikannya dengan pendidikan agama misalnya di lembaga pendidikan swasta yang

³⁰ Jito Subianto, "Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Edukasia* 8, no. 2, (2013): 337.

bernaung dibawah yayasan. e) Adanya penegasan dalam peraturan tentang kualitas pendidikan sebagai tanggapan kebutuhan di masa depan.³¹

3) Lembaga Pendidikan Masyarakat

Lembaga pendidikan selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dan mendiami suatu daerah, di ikat oleh pengalaman yang sama, memiliki jumlah kesesuaian dan mengerti akan keutuhan, serta dapat berperan bersama untuk mengatasi kesulitan dalam kehidupannya.³² Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam upaya untuk menyelenggarakan pendidikan, seperti dapat membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana maupun menyediakan lapangan kerja. Dalam amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 9 berbunyi: “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Maka dari itu, adanya kontribusi masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan sangat mendukung pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa kelak.³³

Lembaga dapat menjadi institusi atau pranata. Adapun lembaga sosial merupakan bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola tingkah laku, peranan dan relasi yang terarah dalam mengikat individu yang memiliki kekuasaan sah dalam hukum, agar tercapai kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Dalam proses peradaban manusia, keberadaan

³¹ Marlina Ghazali, “Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa”, *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 1, (2013): 132.

³² Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, 109-110.

³³ Marlina Ghazali, “Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa”, 134.

lembaga pendidikan di masyarakat merupakan syarat mutlak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kultural-edukatif terhadap anak didik (masyarakat).³⁴ Lembaga pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik maupun walinya. Orang tua atau masyarakat yang dibantu menginginkan keberhasilan dari layanan tersebut, karena mereka sudah mempercayakan anak sepenuhnya kepada lembaga pendidikan yang dipilih, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan terus melayani dan memberikan yang terbaik bagi penyelenggaraan pendidikan agar mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mencerdaskan Bangsa”.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan tentang sistem kekerabatan, Pada penelitian ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maupun perbedaan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada penelitian selanjutnya, dengan tujuan untuk menyempurnakan dan memberikan sudut pandang yang berbeda baik dari aspek pendekatan, fokus penelitian serta keluasan sumber. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang topiknya hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Isabella dari Universitas Lampung Tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Sistem Kekerabatan Terhadap Sikap Nasionalisme Masyarakat Batak Toba di Bandar Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh sistem kekerabatan terhadap sikap nasionalisme masyarakat Batak Toba. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui data angket yang didukung dengan hasil wawancara dan

³⁴ Binti Maunah, “Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Kajian Deskripsi-Analitik Model Lembaga Pendidikan Islam, *Jurnal EMPIRISMA* 24, no. 2 (2015): 267.

³⁵ K.A. Rahman, “Peningkatan Mutu Madrasah melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 244.

observasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem kekerabatan terhadap sikap nasionalisme masyarakat Batak Toba di Bandar Lampung. Hal tersebut menunjukkan semakin eratnya sistem kekerabatan, maka semakin kuat sikap nasionalisme masyarakat Batak Toba. Begitu pun sebaliknya, semakin rendahnya penerapan sistem kekerabatan maka semakin rendah pula nasionalisme masyarakat Batak Toba. Karena dalam sistem kekerabatan Batak Toba juga terdapat unsur yang terkandung dalam sikap nasionalisme seperti keinginan kesatuan dan persatuan serta keinginan untuk senasib dan sepenanggungan.³⁶

2. Penelitian oleh Dewi Anggariani dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2013 dengan judul “Politik Kekerabatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana politik kekerabatan dalam tinjauan organisasi politik yang menggunakan hubungan kekerabatan dalam proses berpolitik. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan berbagai kajian dan sumber. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ikatan kekerabatan yang sangat kuat akan menimbulkan interaksi anggota masyarakat berbentuk kelompok sosial dan melahirkan perasaan senasib sepenanggungan, saling membantu dan tolong menolong secara tulus. Namun kekerabatan yang kuat tersebut dapat membentuk hasrat sifat seseorang untuk membangun struktur politik pada tingkat kecil hingga besar. Adanya hubungan politik dan kekerabatan tidak menjadi jaminan kerukunan seutuhnya, karena tetap akan muncul persaingan dalam bentuk oposisi maupun koalisi berdasarkan ikatan keluarga dan kepentingan kelompok sehingga sering kali kepercayaan dari sebuah keluarga di salahgunakan dengan tidak bijak.³⁷
3. Penelitian oleh Misnal Munir dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2015 dengan judul “Sistem Kekerabatan dalam

³⁶ Isabela, “Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap Sikap Nasionalisme Masyarakat Batak Toba di Bandar Lampung”, *Skripsi*, Universitas Lampung, Tahun 2014, 06.

³⁷ Dewi Anggariani, “Politik Kekerabatan”, 07.

Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kebudayaan Minangkabau dalam sistem kekerabatan berdasarkan aliran filsafat Strukturalisme. Metode yang digunakan yaitu kualitatif berdasarkan sumber lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem yang dianut oleh kebudayaan Minangkabau, dimana perempuan dijadikan sebagai sarana komunikasi antar klen atau suku. Hal tersebut berpengaruh terhadap larangan dan aturan masyarakat Minangkabau tentang sistem kekerabatan dan perkawinan antar suku.³⁸

4. Penelitian oleh Windo Dicky Irawan dalam jurnal Edukasi Lingua Sastra Universitas Muhammadiyah Kotabumi dengan judul “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan kelompok kekerabatan dalam hubungan darah. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan informasi tentang hubungan kekerabatan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk sistem kekerabatan masyarakat Lampung berdasarkan hubungan darah mengikuti garis keturunan ayah terdiri atas kelompok Warei, Kelompok Apak Kemaman, kelompok Adek Warei, dan kelompok Anak. Sistem kekerabatan yang terjalin sangat kental dalam menjunjung sopan santun, sehingga saling menghormati dan menjaga dalam hubungannya.³⁹
5. Penelitian oleh Adon Nasrullah Jamaludin dalam Jurnal el-Harakah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015 dengan judul “Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi”. Tujuan

³⁸ Misnal Munir, “Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss”, *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015): 30-31.

³⁹ Windo Dicky Irawan, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah”, *Jurnal Edukasi Lingua Sastra* 17, no. 2 (2017): 154-157.

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nama marga yang dibangun oleh masyarakat Kampung Sawah Kota Bekasi memiliki kesamaan dengan marga yang ada dalam etnis Batak. Metode yang digunakan berdasarkan pada filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan, terutama untuk menghayati apa yang ada dibalik fenomena sosial tersebut. Hasil penelitian menjabarkan bahwa sistem kekerabatan berdasarkan marga telah ada sejak lama, meskipun dalam masyarakat Kampung Sawah Kota Bekasi terdapat beberapa marga, tetapi kebersamaan dan keharmonisan tetap terjaga karena kesatuan dan komitmen bersama.⁴⁰

Kajian mengenai ketiga penelitian diatas, dapat disimpulkan tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Isabella (Skripsi, 2014) “Pengaruh Sistem Kekerabatan Terhadap Sikap Nasionalisme Masyarakat Batak Toba di Bandar Lampung”	Pada penelitian ini memiliki persamaan tentang sistem kekerabatan yang dijadikan sebagai patokan dalam menentuka	Fokus penelitian yang dikaji yaitu tentang adanya pengaruh implementasi dari sistem kekerabatan terhadap sikap nasionalisme masyarakat Batak Toba. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang dampak sistem kekerabatan terhadap profesionalisme pendidik di MTs Nu Al-Hidayah.

⁴⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi”, *Jurnal el-Harakah* 17, no. 2, (2015): 263-273.

		n struktur sosial.	
2.	Dewi Anggariani (<i>Jurnal Politik Profetik</i> , Vol. 2, No. 2 Tahun 2013) “Politik Keekerabatan”	Pada penelitian ini memiliki persamaan tentang hubungan keekerabatan yang dijadikan sebagai jembatan dan pengikat untuk membentuk suatu lembaga sosial di masyarakat.	Pembahasan pada penelitian ini fokus penelitian terletak pada terbentuknya sistem politik akibat keekerabatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah struktur pendidik dan profesionalisme akibat adanya sistem keekerabatan.
3.	Misnal Munir (<i>Jurnal Filsafat</i> , Vol. 25, No. 1 Tahun 2015) “Sistem Keekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau : Perspektif Aliran Filasafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss”	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang penerapan sistem keekerabatan.	Objek kajian pada penelitian ini terletak pada sistem keekerabatan yang terjadi pada kebudayaan Minangkabau. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek kajian terletak pada profesionalisme pendidik akibat penerapan sistem keekerabatan.
4.	Windo Dicky Irawan (<i>Jurnal Edukasi Lingua Sastra</i>) Universitas	Persamaan penelitian ini adalah sistem hubungan keekerabatan yang terjalin adalah	Perbedaan penelitian ini yaitu objek sistem keekerabatan masyarakat Lampung masih kental dengan tradisi, nilai dan norma, sedangkan penelitian yang akan

	Muhammadiyah Kotabumi “Sistem Keekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah”	berdasarkan garis keturunan ayah atau laki-laki.	dilakukan objek penelitian berfokus pada sistem hubungan kekerabatan dalam profesionalisme pendidik.
5.	Adon Nasrullah Jamaludin (<i>Jurnal el-Harakah</i>) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015 “Sistem Keekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi”	Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitian terhadap sistem kekerabatan yang terjadi dalam masyarakat sederhana (desa).	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan, jika penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi berdasarkan penghayatan, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi, serta dokumentasi.

C. Kerangka Berfikir

Dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan, misalnya pembagian kriteria sekolah negeri dan swasta. Dalam sekolah negeri semua komponen didalamnya diatur oleh pemerintah termasuk penempatan tenaga pendidik. Berbeda dengan sekolah swasta yang semua komponen dan penyelenggaraan diatur oleh sebuah yayasan atau lembaga swasta. Dalam sekolah swasta peran tenaga pendidik sudah ditentukan oleh pihak lembaga atau

yayasan. Hal tersebut yang memungkinkan untuk menciptakan struktur berdasarkan keturunan atau kekerabatan. Proses pengangkatan berdasarkan sistem hubungan kekerabatan dalam sebuah lembaga pendidikan di MTs Nu Al-Hidayah, termasuk pendidik dan jajaran pengurus tidak dibatasi oleh undang-undang. Namun, kadang kala terjadi ketidak sinambungan antara kompetensi atau profesionalisme pendidik dengan kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut.

Penerapan sistem hubungan kekerabatan di MTs Nu Al-Hidayah sudah mulai terbentuk sejak awal berdiri yaitu pada Tanggal 23 Juni 1983. Hal tersebut karena sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap para pendiri yang menjaga hubungan baik melalui ikatan kerabat untuk membangun dan memajukan MTs Nu Al-Hidayah Desa Getassrabi.

Keberadaan pendidik profesional tentu sangat di butuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Nu Al-Hidayah, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan peraturan Undang-undang. Namun, di sisi lain adanya sistem hubungan kekerabatan antar pendidik di MTs Nu Al-Hidayah dapat berdampak terhadap profesionalisme pendidik. Adanya pergeseran aturan yang mementingkan hubungan kerabat dibanding profesionalisme itu sendiri yang dapat menyebabkan terjadinya ketidak sinambungan antara kompetensi atau profesionalisme pendidik dengan kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Namun setelah berjalannya waktu, penerapan sistem hubungan kekerabatan dalam pengangkatan pendidik mulai digeser dan lebih mengutamakan pendidik profesional dan berkompeten di bidangnya terutama untuk menaikkan kualitas pendidikan di MTs Nu Al-Hidayah Desa Getassrabi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil deskripsi tentang penerapan sistem hubungan kekerabatan dalam profesionalisme pendidik di MTs Nu Al-Hidayah Desa Getassrabi Gebog Kudus. Tentang bagaimana kondisi penerapan sistem hubungan kekerabatan, kondisi profesionalisme pendidik, serta dampak penerapan sistem hubungan kekerabatan terhadap profesionalisme pendidik di Mts Nu Al-Hidayah. Sehingga dapat dideskripsikan bagaimana kondisi sistem hubungan kekerabatan dan kondisi

profesionalisme pendidik untuk mengetahui dampak terhadap profesionalisme pendidik walaupun terikat sistem hubungan kekerabatan. Setelah memaparkan kerangka berfikir ini, maka penulis menyederhanakan dengan bagan berikut:



Bagan 2.1
Kerangka Berfikir

